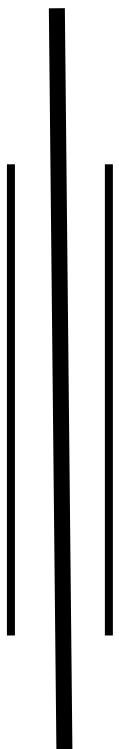


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

JI. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 124 / SK / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari tujuan dan sasaran serta sebagai pedoman pelaksanaan kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh periode 2023-2026, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Diskominfo Kota Banda Aceh tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Dokumen RKT Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjabarkan lebih lanjut dari pelaksanaan tujuan dan sasaran serta pedoman pelaksanaan kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh periode 2023-2026. Dokumen RKT ini menyajikan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat penetapan target dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 17 Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



ALIZAR, S.Ag.,M.Hum

Pembina Utama Muda /

NIP. 19691117 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Penghulu Alam Muhammad SAW, akhirnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. RKT merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan penjabaran strategis dan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2023-2026 yang merupakan wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen RKT Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini mengacu pada dokumen Renstra Diskominfotik sehingga sudah memperhitungkan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Diskominfotik pada bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Informasi yang disajikan dalam RKT Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Diskominfotik Kota Banda Aceh. Dokumen RKT Tahun 2025 yang telah disusun ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Gambaran Umum SKPD | 1 |
| 1.1.1. Tugas Pokok | 1 |
| 1.1.2. Fungsi | 1 |
| 1.2. Struktur Organisasi | 2 |
| 1.3. Tujuan Penyusunan RKT | 3 |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS | |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik Kota Banda Aceh..... | 4 |
| 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan | 5 |
| BAB III PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA | |
| 3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 | 7 |
| 3.2. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 | 10 |
| BAB IV PENUTUP | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A yang mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Qanun ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

1.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

1.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota

1.2. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga Pemerintah Kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;

- b) Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- 4. Bidang E-Government, membawahi
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
- 5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
 - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
- 6. Bidang Statistik, membawahi :
 - a) Seksi Survei Sektoral;
 - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.3. Tujuan Penyusunan RKT

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo kota Banda Aceh

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan rencana tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan pelaksanaan tupoksi yang jelas.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2.1.2. Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani *stakeholder* yang dimiliki. Strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN
KINERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik Kota Banda Aceh dan sebagai upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dan Persandian, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yang menjadi tanggung jawab Diskominfotik Kota Banda Aceh yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 3.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - 3.1.5. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - 3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
 - 3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
 - 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.2. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

Penetapan Kinerja yang merangkum Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaan yang ada di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang telah disusun merupakan perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan kinerja dan pendanaan dalam satu tahun berdasarkan penjabaran dari Renstra Diskominfotik RPD Kota Banda Aceh dan sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Penyusunan RKT sangat penting artinya sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran SKPD, dan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan demi tercapainya target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



ALIZAR, S.Ag.,M.Hum

Pembina Utama Muda /

NIP. 19691117 200112 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

Unit Kerja

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

| No | Sasaran | | | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | | Ket |
|----|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------------|-------------------|--|-------------|---------------|--------|-----|
| | Uraian | Indikator Sasaran | Target | Uraian | Indikator Kinerja | Target | Uraian | Indikator Kinerja | Target | Uraian | Indikator Kinerja | | | Satuan | Target | |
| 1 | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 4.855.653.265 | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 33 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 2.094.810.000 | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 201.657.103 | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 60 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 5.861.356 | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 15.495.747 | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 100.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----|---|---|--|---|---|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | - | | |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 3 | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | - | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 13 | | | |
| | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | | |
| | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 133.319.890 | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | | | |
| | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 698.609.113 | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 51.925.330 | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 90.487.100 | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 4 | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | - | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 13 | | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 158.126.948 | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 58 | | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.435.945.852 |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik | Persentase website OPD yang aktif | 86% | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat | 100% | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat | | | | |
| | | | | | | | 100% | Relasi Media | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 688.899.913 | | |
| | | | | | | | | Keluaran : Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media | Laporan | 5 | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 30.935.900 | | | |
| | | | | | | | | Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasi Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo | Komunitas | 1 | | |
| | | | | | | | | Hasil : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) | 60.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|--|------|--|---|------|---|---|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Pelayanan Informasi Publik | Keluaran | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan | Permohonan | 1 | |
| | | | | | | | | Hasil | : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 55.888.307 | | |
| | | | | | | | | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik | Keluaran | Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah | Rekomendasi | 1 | |
| | | | | | | | | Hasil | : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 58.371.382 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis | Media | 1 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 15.000.000 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun | Dokumen | 1 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 15.000.000 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan | Orang | 45 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | | |
| | | | | | | | | | | | | 924.095.502 | |
| Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | 61% | Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika | 100% | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | persentase layanan e-government yang dikelola | 100% | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 46.742.000 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | Laporan | 1 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | | |
| | | | | | | | | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 38.150.919 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | | |
| | | | | | | | | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 42.987.367 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | Aplikasi | 3 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | | |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 153.115.626 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Perangkat Daerah | 44 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | | |
| | | | | | | | | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Masukan | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 100.000.000 | |
| | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Program | 1 | | |
| | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | | |

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh

ZALIZAR S Ag. M.Hum

Pembina Utama Muda / 19691117 200112 1 002